

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Agustia Wati, dkk., 2019, *Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*, Cetakan ke-2, Samarinda: RV Pustaka Horizon.
- Aris Prio Agus Santoso. dkk., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: PustakaBaruPress.
- Elly Fatimah dan Erna Irawati, 2016, “*Manajemen Aparatur Sipil Negara*” *Modul Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Muktiono Waspodo, dkk, 2020, *Studi Guru Tidak Tetap Pada Jenjang Pendidikan Dasar*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mansyur Ahmad KM, 2018, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Balai Pustaka.
- Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-12, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-17, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan dan Nurmawati Ayuningtyas Harahap, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: UII Press.
- Rosady Ruslan, 2020, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sri Hartini, dkk., 2010, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke-II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Skripsi atau Tesis:

- Adilla Rahmatushiva, dkk., 2024, "Analisis Penataan Kepegawaian ASN Di Indonesia: Penghapusan Tenaga Honorer Pada UU Nomor 20 Tahun 2023", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 6.
- Ahmad Rifai, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan dengan Guru Honorer Sekolah Negeri di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 2 No. 2.
- Alfian Syarif, 2024, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah Provinsi Jambi", *Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Jambi*.
- Dian Sudiana dan Heri Yusuf Muslihin, 2024, "Upaya Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer Melalui Kegiatan Pemberdayaan", *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
- Hilmi Fauz dan Djunawir Syafar, 2017, "Studi Tentang Kebijakan Guru Honorer Sekolah Dasar di Yogyakarta", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Irham, 2021, "Perbedaan Motivasi Kerja Guru Sertifikasi dan Nonsertifikasi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Jambi", *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi*.
- Irva Afrizalni, Hilda Desma Fitri, Silvina Maharani Putri, dan Yulia Hanoselina, 2024, "Masa Depan Guru Honorer Terkait dengan Penghapusan Tenaga Honorer Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023". *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, Vol. 2 No. 1.
- Muhtarom dan Abdul Azis, 2023, "Mencandra Realitas Guru Honorer Zaman Now (Sebuah Kajian Konseptual)", *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 14 No. 1.
- Naftali Yesaya Gabriel Sumanti, dkk., 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 No. 4.
- Rahmad Arif Rivaldi, 2021, "Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sarolangun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Rizky Indah Permata Safitri dan Sonhaji, 2022, "Jaminan Perlindungan Hukum Hak-Hak Guru Dengan Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (Honorer)”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5 No. 1.

Slamet Arif Maulana, 2023, “Status Kepegawaian Guru Honorer Pasca Diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.Sm.02.03/2022 Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Padang”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas*.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Guru Tetap Pada Madrasah Negeri di Lingkungan Departemen Agama

Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Guru Pada Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepmenPAN-RB) Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 720 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru, Kepala, dan Pengawas Madrasah

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/239/M.SM.01.00/2025 tentang Penjelasan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024

D. Website dan Internet:

https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/95_guru-adalah-pelayan-publik-di-bidang-pendidikan.

<https://padang.kemenag.go.id/post/profile-kantor-kementerian-agama-kota-padang>.

<https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-ikhtiar-selesaikan-sertifikasi-guru-melalui-ppg-sampai-2026-KDQjE>.

<https://ntt.kemenag.go.id/arsip/5655/guru-adalah-pelayan>.

<https://money.kompas.com/read/2025/01/17/191700926/berapa-lama-masa-kerja-pppk-paruh-waktu-ini-penjelasan>.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--guru-sebagai-pahlawan-pelayanan-publik>.

<https://radarkediri.jawapos.com/nasional/786000676/kontrak-pppk-paruh-waktu-tak-otomatis-diperpanjang-ini-syarat-penting-dari-menpan-rb-yang-harus-dipenuhi-honorer>.

<https://sdnkeputran2.sch.id/news32-13-peranan-guru-sebagai-pendidik.html>.

<https://www.ayobandung.com/umum/7914353398/nasib-tenaga-honorer-r2-dan-r3-tanpa-l-pada-pengumuman-kelulusan-seleksi-cpns-dan-pppk-tahap-1-ini-kata-menpanrb>.

<https://puyuhkuayan.com/artikel/menpanrb-jelaskan-nasib-tenaga-honorer-r2-dan-r3-tanpa-l-di-pengumuman-kelulusan-cpns-dan-pppk-tahap-1#:~:text=Surat%20MenPAN%20RB%20Nomor%20B%2F239%2FMSM.01.00%2F2025&text=Surat%20ini%20khususnya%20mengakomodasi%20tenaga,formasi%20pada%20seleksi%20PPPK%20sebelumnya>.

E. Wawancara:

Wawancara dengan Dina Wahyuni, S.H., Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara Kemenag Kota Padang, 5 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Hermaini, S.E., Operator TU MAN 1 Kota Padang, 11 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Nadya Faranda, S.Pd., Operator TU MTsN 2 Kota Padang, 17 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Afifah, S.Pd., Guru Tidak Tetap Al-Qur'an Hadits MAN 1 Kota Padang, 10 Juni 2025, pukul 09.45 WIB.

Wawancara dengan Novi Elfira Dista, S.Pd., Guru Tidak Tetap IPA MTsN 2 Kota Padang, 19 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Windy Kasmita, M.Pd., Guru Tidak Tetap Fisika MAN 1 Kota Padang, 12 Juni 2025, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Surya Ningsih, S.Pd., Guru Tidak Tetap Pendidikan Pancasila MTsN 2 Kota Padang, 12 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ayu Ratna Ningsih, S.Pd., Guru Tidak Tetap MIN 2 Kota Padang, 16 September 2025, pukul 11.00 WIB.

